

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Dewasa ini lembaga keuangan non perbankan menarik perhatian sebagian besar masyarakat. Tidak terkecuali di Provinsi Kabupaten Buleleng, Lembaga keuangan non perbankan memiliki peminat yang tidak sedikit. Salah satunya adalah BUMDes, dimana Lembaga ini merupakan Badan Usaha Milik Desa, suatu badan hukum yang didirikan oleh satu desa dan bersama dengan desa-desa lainnya yang berguna untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberadaan BUMDes dikatakan mampu mengurangi pengangguran dan mampu mencegah perpindahan penduduk dari desa ke kota. BUMDes juga memberikan kontribusi untuk membangun desa dengan perputaran uang yang sehat. Indikator keuangan pada BUMDes menunjukkan bahwa peningkatan penjualan, peningkatan modal, dan kinerja BUMDes di Provinsi Bali dapat dinyatakan baik (Sinarwati & Prayudi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting untuk pembangunan desa. Terlebih lagi pemerintah sudah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan BUMDes dengan adanya indikator penerbitan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa, pemberian bantuan modal dan program pendampingan.

Di Provinsi Bali perkembangan BUMDes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali

menargetkan seluruh desa yang ada di Bali sudah mempunyai BUMDes pada tahun 2023 (Suadnyana, 2019). Kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati & Prayudi (2019) bahwa : 1) Perkembangan BUMDes di Provinsi Balimengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018; 2) Peran BUMDes dalam bidang ekonomi membantu penyediaan modal bagi industri rumah tangga di desa; 3) Peran di sektor non- ekonomi mengurangi pergerakan penduduk dari desa ke kota; 4) Faktor yang mendukung terwujudnya peran dalam pembangunan desa adalah bantuan keuangan desa. Dari 8 kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng disebut sebagai kabupaten BUMDes dikarenakan pada akhir tahun 2019 omsetnya sebesar Rp 60,9 miliar dengan laba Rp 11,2 miliar (Prasetya, 2020).

Tabel 1. 1  
Data Perbandingan Omset BUMDes Di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Omset	%
1	Gerokgak	7.721.340.000	12,85%
2	Seririt	7.211.370.000	12,00%
3	Busungbiu	6.783.010.000	11,29%
4	Banjar	5.565.715.000	9,26%
5	Sukasada	5.825.598.550	9,70%
6	Buleleng	10.501.507.240	17,48%
7	Sawan	7.374.453.350	12,27%
8	Kubutambahan	5.000.084.340	8,32%
9	Tejakula	4.100.174.420	6,82%
<b>TOTAL</b>		<b>60.083.252.900</b>	100,00%

Sumber : Dinas PDM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data omset BUMDes di masing-masing kecamatan, total omset mencapai Rp 60.083.252.900 dengan kontribusi dari sembilan kecamatan. Kecamatan Buleleng memiliki kontribusi terbesar sebesar 17,48% dengan omset Rp 10.501.507.240, menempatkannya sebagai kecamatan

dengan omset tertinggi. Diikuti oleh Kecamatan Gerokgak yang menyumbang 12,85% atau Rp 7.721.340.000, serta Seririt yang memberikan kontribusi 12,00% dengan omset Rp 7.211.370.000. Kecamatan Sawan dan Busungbiu memiliki kontribusi masing-masing sebesar 12,27% dan 11,29%, dengan omset Rp 7.374.453.350 dan Rp 6.783.010.000. Kecamatan lainnya seperti Sukasada dan Banjar juga memberikan kontribusi cukup signifikan dengan persentase masing-masing 9,70% dan 9,26%, menyumbang Rp 5.825.598.550 dan Rp 5.565.715.000. Kubutambahan memiliki kontribusi sebesar 8,32% dengan omset Rp 5.000.084.340, sementara Tejakula menjadi kecamatan dengan kontribusi terendah, menyumbang 6,82% atau Rp 4.100.174.420. Secara keseluruhan, kontribusi dari kecamatan-kecamatan ini menunjukkan distribusi yang cukup merata, dengan Buleleng sebagai pemimpin dalam hal omset, diikuti oleh Gerokgak, Seririt, dan kecamatan lainnya yang tetap berkontribusi signifikan terhadap total keseluruhan.

Kecamatan Buleleng, sebagai penyumbang omset terbesar (17,48%) dibanding kecamatan lainnya, memiliki peran penting dalam mengelola keuangan BUMDes. Tingginya omset ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang efektif, termasuk peran tingkat pendidikan para pengelola, sistem pengendalian internal, dan penerapan siklus akuntansi yang baik. Pada kasus ini, kita dapat melihat bahwa kualitas laporan keuangan BUMDes sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dengan omset yang besar, kecamatan seperti Buleleng perlu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tingkat pendidikan memadai agar dapat menjalankan siklus akuntansi dengan benar dan mematuhi sistem pengendalian internal yang ketat. Hal ini akan

berdampak langsung pada transparansi dan akurasi laporan keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan strategis dan kepercayaan publik.

Namun, meskipun Kecamatan Buleleng memiliki omset tertinggi, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Beberapa kecamatan seperti Banjar dan Tejakula, yang memiliki omset lebih rendah, mungkin menghadapi masalah terkait tingkat pendidikan pengelola atau lemahnya pengendalian internal, sehingga kualitas laporan keuangan mereka mungkin kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama dalam konteks BUMDes yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan tingkat pendidikan pengelola, serta penerapan siklus akuntansi yang baik akan sangat penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan BUMDes di seluruh kecamatan, terutama di kecamatan dengan omset besar. Berikut beberapa kasus korupsi pada BUMDes yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng berdasarkan dari berbagai sumber.

Tabel 1. 2  
Data BUMDes Yang Bermasalah

No.	Lokasi	Sumber
1.	BUMDes Mekar Laba (Desa Temukus, Kecamatan Banjar)	detikbali.com, 2022
2.	BUMDes Amertha (Desa Patas, Kecamatan Gerokgak)	koranbuleleng.com, 2022
3.	BUMDes Gema Matra (Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu)	koranbuleleng.com, 2022
4.	(BUMDes) Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali,	detikbali.com, 2022

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa kasus yang terjadi pada Bumdes diantaranya adalah Kasus BUMDes Mekar Laba di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, melibatkan dugaan korupsi oleh dua mantan pengurusnya. Kedua terdakwa, Nyoman Budiani alias Lisa dan Luh De Intan Pratiwi, dituntut hukuman penjara karena diduga menyalahgunakan dana BUMDes sebesar Rp 283 juta. Nyoman Budiani, yang bertugas sebagai pemungut tabungan, dituntut hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta. Sementara itu, Luh De Intan Pratiwi, mantan kasir, dituntut hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda yang sama. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara, dengan Budiani harus membayar Rp 67.472.500 dan Intan Rp 36.349.500. Kasus ini mencuat setelah sejumlah nasabah BUMDes Mekar Laba mengeluh tidak bisa menarik tabungan mereka sejak akhir tahun 2019, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut.

Kasus BUMDes Amertha di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, melibatkan dugaan korupsi oleh mantan ketuanya. Ia diduga menyalahgunakan dana BUMDes sebesar Rp 511,6 juta selama periode 2010 hingga 2017. Ketua Bumdes menggunakan berbagai modus operandi, termasuk membuat kredit fiktif dan melakukan penarikan uang tanpa didampingi bendahara. Akibat kasus ini, BUMDes Amertha mengalami kerugian besar dan akhirnya ditutup secara permanen setelah tiga tahun tidak beroperasi. Keputusan penutupan ini diambil melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang juga membebaskan kewajiban masyarakat yang berstatus sebagai kreditur di BUMDes tersebut.



Kasus BUMDes Gema Matra di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, melibatkan dugaan korupsi oleh mantan bendahara berinisial NPM. Ia diduga menyalahgunakan dana BUMDes sebesar Rp 250 juta selama periode 2012 hingga 2014. Modus operandi yang digunakan termasuk tidak menyetorkan uang nasabah ke rekening bank milik BUMDes dengan alasan jarak bank yang terlalu jauh. NPM telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng setelah pemeriksaan intensif. Sebelumnya, mantan ketua BUMDes berinisial INJ juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Kasus BUMDes Banjarasem Mandara di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, melibatkan dugaan korupsi oleh mantan bendahara, Made Agus Tedi Arianto alias MAT. Ia diduga menyalahgunakan dana BUMDes sebesar Rp 274 juta. MAT ditahan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng pada 21 Februari 2023. MAT diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, tanpa membeli aset seperti mobil atau rumah. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 304 juta. Kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar dan siap untuk disidangkan.

Dalam kasus-kasus di atas, faktor pendidikan pengelola BUMDes menjadi penting. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan akuntansi dapat mengakibatkan tindakan yang tidak sesuai prosedur, atau bahkan penyalahgunaan dana. Sebagai contoh, beberapa pengurus BUMDes terlibat dalam penyalahgunaan dana melalui kredit fiktif atau penarikan dana tanpa prosedur yang jelas. Pendidikan yang

lebih tinggi atau pelatihan khusus mengenai manajemen dan akuntansi bagi pengelola BUMDes berpotensi membantu mereka memahami tanggung jawab secara lebih mendalam dan menerapkan praktik yang lebih sesuai dalam pengelolaan keuangan.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya melindungi BUMDes dari penyalahgunaan dana oleh pengurus. Misalnya, di BUMDes Amertha, mantan ketua berhasil menyalahgunakan dana dengan membuat kredit fiktif dan melakukan penarikan tanpa persetujuan bendahara. Situasi ini menunjukkan tidak adanya atau lemahnya mekanisme pengawasan yang dapat mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi. Sistem pengendalian internal yang baik berperan penting dalam memastikan adanya pemisahan tugas dan pengawasan yang efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan integritas laporan keuangan.

Ketidaktertiban dalam siklus akuntansi turut memengaruhi kualitas laporan keuangan. Contohnya, mantan bendahara di BUMDes Gema Matra tidak menyetorkan dana ke rekening bank BUMDes dengan dalih jarak yang terlalu jauh, yang pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan dana. Siklus akuntansi yang baik meliputi pencatatan transaksi secara sistematis, termasuk proses verifikasi dan penyimpanan dana yang seharusnya dilakukan secara disiplin. Siklus akuntansi yang tertib membantu menjaga keakuratan laporan keuangan, menghindari kesalahan pencatatan, serta memperkecil peluang bagi individu untuk melakukan tindakan penyelewengan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (Devi, 2019). Fakta lain yang didapatkan saat melakukan kunjungan ke BUMdes di Kecamatan Seririt , ditemui penyusunan laporan keuangan yang masih sederhana, pencatatan yang dilakukan berdasarkan contoh dari laporan yang ada sebelumnya, format yang digunakan tidak lengkap sesuai dengan Laporan Keuangan Bumdes yang semestinya. Pegawai yang bertugas dibagian keuangan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan (Sofyan, 2016).

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Jika penyusunan laporan keuangan masih sederhana dan tidak disajikan dengan lengkap maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi BUMDes, yaitu BUMDes tersebut akan kesulitan untuk mengembangkan usahanya dan akan terjadi kekeliruan untuk mengartikan kondisi BUMDes dalam keadaan laba atau rugi, sehingga dari hal tersebut laporan keuangan yang disusun tidak bisa dikatakan andal dan dapat dipahami karena mengarah pada hal yang menyesatkan dan adanya kekeliruan untuk mengartikan kondisi keuangan BUMDes tersebut. Selain itu, kemungkinan dapat terjadi tindak kecurangan baik dari segi sistem



pengendalian internalnya yang kurang efektif atau belum diterapkannya siklus akuntansi sesuai standar yang sudah ditentukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat perbedaan variabel. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel yang hasilnya tidak berpengaruh dengan variabel baru, variabel-variabel tersebut antara lain tingkat pendidikan, sistem pengendalian internal dan siklus akuntansi. Dikarenakan variabel tingkat pendidikan dan sistem pengendalian internal merupakan variabel yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan maka dari itu pada penelitian ini akan diteliti kembali. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel, populasi, serta lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga hal-hal tersebut dilihat sebagai suatu kebaruan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Alasan pemilihan sampel di Kecamatan Buleleng adalah karena beberapa tahun terakhir ini, kasus kerugian pada BUMDes paling banyak terjadi di Kecamatan Buleleng.

Terkait dengan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, sistem pengendalian internal, dan siklus akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES (Studi kasus BUMDES di Kecamatan Buleleng).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi:

### 1. Tingkat Pendidikan Pengelola BUMDes

Banyak pengurus BUMDes yang memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

### 2. Kualitas Sistem Pengendalian Internal

Tidak semua BUMDes memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan, sehingga menimbulkan risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan.

### 3. Siklus Akuntansi yang Tidak Konsisten

Beberapa BUMDes mungkin belum menerapkan siklus akuntansi secara lengkap dan konsisten. Siklus akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akan berdampak pada ketepatan dan keakuratan laporan keuangan, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

### 4. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di BUMDes juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengelola BUMDes seringkali belum didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan.

#### 5. Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa atau kecamatan terkait tata kelola BUMDes terkadang belum mendukung sepenuhnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini berdampak pada bagaimana pengurus BUMDes menjalankan tugasnya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

#### 6. Laporan Keuanga Belum Akuntabel

Sampai saat ini masih terdapat BUMDes yang laporan keuangnya bermasalah di Kabupaten Buleleng, terutama yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola operasional BUMDes. Kecenderungan kecurangan tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang kurang efektif.

#### 7. Laporan Keuangan Belum Terstandarisasi

Masih terdapat BUMDes yang menyusun laporan keuangannya secara sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat BUMDes yang tidak menerapkan siklus akuntansi sesuai landasan hukum BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

#### 8. Ketidaksesuaian Penempatan kerja

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki juga mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan. Pada bagian kinerja diperlukan pegawai yang sudah memiliki ilmu akuntansi karena dalam menjalankan sebuah Unit Usaha BUMDes tentunya diperlukan sebuah laporan keuangan yang berfungsi untuk mengetahui seberapa untung Unit Usaha BUMDes yang berjalan. Karena

itulah pentingnya latar belakang pendidikan pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan dana investor melalui proses akuntansi.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, beberapa batasan ditetapkan agar penelitian lebih fokus dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke BUMDes di kecamatan lain, karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi lingkungan, sumber daya manusia, dan kebijakan pengelolaan di masing-masing wilayah.
2. Penelitian ini membatasi variabel independennya pada tiga faktor, yaitu tingkat pendidikan, sistem pengendalian internal, dan siklus akuntansi. Faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti budaya organisasi, teknologi informasi, atau sumber daya keuangan, tidak akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes selama tahun anggaran 2025. Penelitian ini tidak mencakup perubahan yang mungkin terjadi pada periode berikutnya atau sebelumnya.
4. Subjek penelitian ini adalah pengurus dan staf BUMDes yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, serta pihak-pihak yang berperan

dalam proses penyusunan laporan keuangan. Responden terbatas pada mereka yang memiliki posisi relevan dengan variabel penelitian.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, yaitu:

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah Siklus Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh Siklus Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes di Kecamatan Buleleng.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.



## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memahami pengaruh tingkat pendidikan, sistem pengendalian internal, dan siklus akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien dalam konteks pemerintahan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sekaligus yaitu :

- a. Bagi BUMDes: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengurus BUMDes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan pentingnya pendidikan pengurus, penerapan sistem pengendalian internal yang baik, serta pelaksanaan siklus akuntansi yang tepat. Dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik, BUMDes dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari masyarakat serta pihak terkait lainnya.
- b. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah desa dan kecamatan, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan BUMDes. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif terkait

peningkatan pendidikan pengelola BUMDes, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan siklus akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

- c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi yang tertarik pada topik pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan desa, khususnya di BUMDes. Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melakukan kajian lebih lanjut, mengembangkan teori, serta merancang program pendidikan yang relevan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di BUMDes.

